



Reformasi Birokrasi

— dan —
Good Governance



- Abd. Rohman, S.Sos., M.A.P. -
- Dr. Willy Tri Hardianto, S.Sos., M.M., M.A.P. -

REFORMASI BIROKRASI
DAN GOOD GOVERNANCE

SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASIKAN UNTUK Mendukung
KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA
www.intranspublishing.com

- Abd. Rohman, S.Sos., M.A.P. -
- Dr. Willy Tri Hardianto, S.Sos., M.M., M.A.P. -

REFORMASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE

Intrans Publishing
2019

REFORMASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE

Penulis:

Abd. Rohman, S.Sos., M.A.P.

Dr. Willy Tri Hardianto, S.Sos., M.M., M.A.P.

Cover: Rahardian Tegar Lay Out: Nur Saadah**

Cetakan Pertama, September 2019

ISBN:

Diterbitkan Oleh:

Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Pernaskahan: redaksi.intrans@gmail.com

Email Pemasaran: intrans_malang@yahoo.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abd. Rohman & Willy Tri Hardianto

Reformasi Birokrasi dan Good Governance/Penyusun, Abd. Rohman & Willy Tri Hardianto — Cet.1.—Malang: Intrans Publishing, 2019

xiv + 148 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

1. Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan I. Judul II. Perpustakaan Nasional

320

Didistribusikan oleh:

PT. Cita Intrans Selaras (Citila)

Pengantar Penulis . . .

Suatu keniscayaan, pada awal pengantar ini penulis ingin menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala pertolongan dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun dan merangkai kata-kata hingga terkumpul menjadi naskah buku, yang penulis beri judul “**Reformasi Birokrasi dan Good Governance**”. Dalam menyusun buku ini, penulis tidak dapat memungkiri banyak merujuk pada buku-buku yang terlebih dahulu terbit dan beredar di kalangan akademisi maupun praktisi. Sebagai ucapan terima kasih kepada para ahli yang argumentasinya penulis jadikan rujukan, maka penulis cantumkan sebagai referensi di halaman daftar pustaka.

Dalam buku ini, sebenarnya penulis hanya ingin turut andil menyebarkan secercah ilmu pengetahuan sekalipun pada sisi yang lain penulis sadari akan kekurangan dan kelamahan. Buku ini disusun berdasarkan pengetahuan, pengalaman di dalam kelas mengajar, dan pengalaman-pengalaman lapangan

yang pernah bersinggungan. Tidak cukup banyak memang, namun bagi penulis sesedikit apapun, ilmu pengetahuan yang dimiliki tetap harus disampaikan sebagai upaya saling memberi dan menerima (*giving and receiving*).

Bagian pertama buku ini memuat tentang pendahuluan yang memaparkan tentang perjalanan birokrasi hingga pada titik birokrasi harus berhadapan dengan situasi-kondisi yang mengharuskan adanya perbaikan komprehensif (reformasi birokrasi). Reformasi birokrasi tidak datang begitu saja, melainkan didahului oleh berbagai dinamika, pergeseran paradigma, hingga pada kondisi masyarakat yang terbuai oleh pesatnya perkembangan Iptek. Birokrasi yang beberapa tahun terakhir dijalankan, masih banyak disinyalir sebagai produk-produk kolonial belanda. Sehingga kritikan dan saran datang silih berganti untuk mengubah berbagai hal yang berhubungan dengan birokrasi.

Bagian kedua mengupas tentang konsep reformasi birokrasi baik secara etimologi maupun dari sisi terminologi. Pembahasan pada bagian kedua ini juga menyangkut perkembangan istilah-istilah hingga pada istilah birokrasi yang dikenal saat ini. Tentu dalam buku ini lebih ditekankan pada birokrasi publik mengingat target dan sasarannya adalah akademisi dan praktisi yang bergelut di birokrasi publik. Namun juga tidak dipungkiri, dalam buku ini penulis juga sedikit membahas hal-hal privat sebagai perbandingan dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan masalah publik. Pada bagian kedua ini, penulis lebih banyak menyinggung konsep-konsep reformasi birokrasi, khususnya yang dipaparkan oleh pemerintah selama ini sebagai upaya menyongsong terwujudnya birokrasi kelas dunia.

Pada bagian ketiga, penulis uraikan bagian tersendiri dari *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah. Paparan dalam bagian ini, termasuk membahas strategi hingga tahap-tahap pelaksanaannya. Reformasi birokrasi bukan hanya pada tataran wacana sebagai geliat ledakan egosentris sebagian besar orang untuk lepas dari embel-embel kolonial, melainkan harus sampai pada tataran akar rumput sehingga antara pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki peran menyukseskan agenda besar reformasi birokrasi. Oleh karena itu, dalam bagian ini, penulis juga menyisipkan ukuran keberhasilan beserta indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada bagian keempat, penulis memaparkan tentang dinamika sosial dan politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika yang terjadi dalam

reformasi birokrasi. Dinamika sosial dan politik selama ini disinyalir banyak mengintervensi birokrasi. Dinamika politik yang terjadi, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sedikit banyak memberikan pengaruh pada dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi dengan segala perlengkapannya dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi.

Bagian kelima menjelaskan tentang *good governance* sebagai bagian ujung dari reformasi birokrasi. Pada bagian ini penulis memulai dari konsep dasar *good governance*, unsur-unsur yang harus ada, prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, syarat dan pelaku, hingga hambatan-hambatan dalam mewujudkan *good governance*. Memang konsep *good governance* sudah dikenal cukup lama, namun diakui atau tidak, pada negara-negara berkembang konsep tersebut baru mulai dijalankan menyusul himbauan dari IMF yang mengharuskan negara-negara yang menerima bantuan harus menjalankan *good governance*. Titik inti *good governance* adalah bagaimana suatu negara dapat melibatkan tiga unsur pokok dalam berbagai aktivitasnya, yakni pemerintah sendiri, pihak swasta, dan *civil society*.

Pada bagian keenam, penulis membahas tentang pelayanan publik sebagai hilir dari birokrasi secara teknis. Pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting bahwa *good governance* dalam suatu negara telah terwujud. Pelayanan publik merupakan produk pasti dari birokrasi, sehingga birokrasi juga disebut sebagai ruang sentral interaksi antara pemerintah dan warganya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan cita-citanya. Dalam bagian ini membahas tentang konsep pelayanan publik, barang-barang publik dan privat, tantang pelayanan publik saat yang akan datang, kepuasan terhadap pelayanan publik, hingga pada pengawasan pelayanan publik.

Pada bagian penutup sebagai bagian akhir, penulis memberikan catatan bahwa pelayanan publik memang tidak semestinya diartikan sebagai pemberian pelayanan perusahaan atau organisasi swasta terhadap konsumen atau pelanggannya, melainkan lebih kepada antar-*klien* dimana pemerintah dan masyarakat sama-sama berperan dalam pelayanan publik. Kondisi demikian diharapkan mampu melahirkan kehangatan dan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek dari pelayanan.

Di akhir kata, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu dalam penyelesaian buku ini. Terlepas dari kelebihan yang ada, penulis sadari akan banyaknya kekurangan karena keterbatasan *knowledge* dan wawasan. Saran-saran sangat dibutuhkan dari sidang pembaca sekalian sebagai evaluasi demi perbaikan ke depannya. Semoga rangkaian kata dalam buku ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat. Selamat membaca.

Malang, 27 April 2019

Penulis

Pengantar Penerbit . . .

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyat objek lain yang membutuhkannya. Celaknya, praktik korupsi kolusi dan nepotisme yang masih banyak menjangkiti tubuh birokrasi tak kunjung hilang, serta mentalitas birokrat yang amoral juga masih banyak ditemukan. Demi melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten serta untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan sebagai landasan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2011 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Tujuan pelaksanaan reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, untuk

menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumber daya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat. Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga klaster: klaster *pertama* yakni Penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah; klaster *kedua* yakni Penerapan *e-government* dan *e-governance*; klaster *ketiga* yakni Kerja sama antar-pemerintah “*collaborative Governance*”. Tujuan pertamanya yakni memperkuat pemerintahan di daerah, meredefinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam *territorial bond*. Kedua, reformasi mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah melalui sistem kerja yang transparan, efektif, efisien, responsif, dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi.

Rekomendasinya yakni diperlukan sinergitas antar-pemerintah yang bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang. Dengan begitu, ketiga klaster dari tujuan reformasi birokrasi tersebut dapat berjalan dengan sinergis.

Buku ini mengantar pembaca untuk menyelami kajian birokrasi dan pemerintahan. Sebagai kajian pengantar, buku ini juga perlu dibaca oleh mahasiswa yang mengkaji materi dasar mengenai reformasi birokrasi dan *governance*.

Penerbit memberikan apresiasi kepada penulis karena telah memberikan sumbangsih terhadap pendalaman kajian di ranah administrasi negara. Kajian ini menjadi sangat penting dan relevan di tengah visi negara untuk terus menerus menghadirkan citra dan kerja yang semakin baik.

Selamat membaca. Mari, rebut perubahan dengan membaca!

Daftar Isi

Pengantar Penulis ... v

Pengantar Penerbit ... x

Daftar isi ... xii

Pendahuluan ... 1

BAGIAN 1: REFORMASI BIROKRASI ... 5

- A. Pengertian Reformasi Birokrasi ... 5
 - B. Sejarah dan Perkembangan Birokrasi ... 12
 - C. Perkembangan Birokrasi di Indonesia ... 14
 - D. Birokrasi Publik ... 15
 - E. Aspek Utama Membangun Birokrasi ... 17
 - F. Visi dan Misi Reformasi Birokrasi ... 19
 - G. Tujuan Reformasi Birokrasi ... 20
 - H. Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi ... 21
 - I. Sasaran Reformasi Birokrasi ... 25
 - J. Kondisi Birokrasi Saat Ini ... 25
 - K. Permasalahan Reformasi Birokrasi ... 28
 - L. Kondisi Birokrasi yang Diharapkan ... 31
 - M. Etika Birokrasi ... 33
 - N. Perilaku dan Budaya Birokrasi ... 37
-

BAGIAN 2: GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI ... 44

- A. *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi ... 44
 - B. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ... 49
 - C. Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ... 53
-

BAGIAN 3: DINAMIKA SOSIAL-POLITIK ... 56

- A. Dinamika Sosial ... 56
 - B. Pengertian Dinamika dan Perubahan Sosial ... 59
 - C. Pengetian Perubahan Sosial ... 60
 - D. Faktor Pendorong Perubahan Sosial ... 63
 - E. Dampak Hubungan Sosial ... 67
 - F. Dampak Perubahan Sosial terhadap Birokrasi ... 67
 - G. Dinamika Politik ... 69
 - H. Kedekatan Politik ... 71
-

BAGIAN 4: GOOD GOVERNANCE ... 73

- A. Konsep *Governance* ... 73
 - B. Unsur-unsur *Governance* ... 74
 - C. Prinsip-prinsip Dasar *Governance* ... 76
 - D. Konsep *Good Governance* ... 77
 - E. Prinsip, Asas, dan Elemen *Good Governance* ... 80
 - F. Syarat dan Pelaku *Good Governance* ... 87
 - G. Upaya Mewujudkan *Good Governance* ... 88
 - H. Kendala Mewujudkan *Good Governance* ... 89
 - I. Strategi Mewujudkan *Good Governance* ... 91
-

BAGIAN 5: PELAYANAN PUBLIK ... 93

- A. Pengertian Pelayanan ... 97
- B. Pelayanan Publik, Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintah, Pelayanan Perizinan ... 101
- C. Pengertian Pelayanan Publik ... 104
- D. Pelayanan Swasta ... 107
- E. Kepentingan Publik ... 108
- F. Tantangan Pelayanan Publik ... 110
- G. Asas Pelayanan Publik ... 112
- H. Prinsip Pelayanan Publik ... 115
- I. Standar Pelayanan Publik ... 117

J. Pola Pelayanan Publik ...	119
K. Biaya Pelayanan Publik ...	120
L. Jenis Pelayanan Publik ...	121
M. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pelayanan Publik ...	122
N. Tatalaksana Pelayanan Publik ...	126
O. Kepuasan Pelayanan Publik ...	128
P. Pengawasan Pelayanan Publik ...	129
Q. Pelaku Pengawasan Pelayanan Publik ...	132
R. Warga Negara dan Pelayanan Publik ...	134

Penutup ... 139

Daftar Pustaka ... 142

Tentang Penulis ... 146

Daftar Pustaka

- Albrow, Martin. 1996. *Birokrasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Christian, Gronroos. 1990. *Service Management and Marketing: A Moment of Truth*. Singapore: Maxwell Macmillan International.
- Denhardt, Janet V & Denhardt, Robert B. 2003. *The New Public Service*. Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu. 2013. *Pelayanan Publik Baru Dari Manajemen Steering ke Serving*. Cet. I. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia: Seri Kajian Birokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees.
- Ekowanti, Lilik, Mas Roro. 2017. *Kemitraan dalam Otonomi Daerah*. Malang: Inteligensia Media.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen: Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hendra. 2011. *Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance*. Malang: Skripsi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.
- Hidayati, Khoiru, dkk. ed. 2007. *Ilmu Pengaturan Sosial: SOSIOLOGI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Iqrom, Pahrizal. 2013. *Reformasi Birokrasi di Nusantara*. Malang: UB Press.
- Ivancevich, Lorenzi, Skinner, dan Crosby. 2000. *Manajemen dan Kualitas Kompetitif*. Terjemahan Muhammad Musa. Jakarta: Fajar Agung.
- Lindawaty, Debora Sanur, Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Handrini Ardiyanti, Riris Katharina. 2017. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Maryati, Kun & Juju Suryawati. 2001. *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII Standar Isi 2006*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mukarom, Zainal & Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Murdiyatomoko, Janu. 2009. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat, untuk Kelas XIII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Grafindo.
- NN. 2018. "Pelayanan". *KBBI*, Minggu, 13 Januari 2018. <<https://kbbi.web.id/pelayanan>>.
- NN. 2018. "Reformasi". *KBBI*, 22 Desember 2018. <<https://kbbi.web.id/reformasi>>.
- NN. 2018. "Reformasi". *Wikipedia*, 22 Desember 2018. <<https://id.wikipedia.org/wiki/Reformasi>>.
- NN. 2019. "Prinsip". *KBBI*, 8 Februari 2019. <<https://kbbi.web.id/prinsip>>.
- Nugroho, Adi, Susanti. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nurdin, Ismail. 2013. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

- Rohman, Abd. 2013. “*Kepemimpinan Pelayanan Prima*”. Skripsi. Malang: Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.
- Rohman, Abd. 2018. *Dasar-dasar Manajemen Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Saggaf, Said, dkk. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*. Makassar: CV. Sah Media.
- Said, Abdullah. 2018. *Perencanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Intelegensia Media.
- Saleh, Muwafik. 2010. *Public Service Communication, Praktek Komunikasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: UMM Press.
- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Cet. I. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*. Cet. 3. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Cet. IV. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2016. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. (Edisi Revisi). Cet. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2007. *Manajemen publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Thahjono, Herry. 2011. *Culture Based Leadership, Menuju Kebesaran Diri & Organisasi Melalui Kepemimpinan Berbasis Budaya dan Budaya Kinerja Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, Hussein. 2005. *Riset Sumber daya Manusia*. Cet. VII. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

- Waluya, Bagja. 2006. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Warjio. 2015. *Politik Belah Bambu Jokowi: Dari Mafia Politik Sampai Islamfobia*. Medan: Puspantara.
- Yusriadi. 2018. *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Sleman: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV. Budi Utama).

Tentang Penulis



Abd. Rohman, S.Sos., M.A.P., lahir di Desa Pacangga'an Pangarengan Sampang Jawa Timur, merupakan Dosen pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN I Pacangga'an, sekolah menengah pertama pada MTs. Nurul Huda al-Maronyah Pangarengan, dan sekolah menengah atas di MA al-Mas'udiyah Pramian Sreseh

Sampang. Gelar sarjana dan magisternya diperoleh dari Universitas tempat ia mengajar saat ini.

Selain aktif menulis buku, ia juga aktif menulis artikel di media massa, menjadi editor buku, menjadi pembicara forum ilmiah, dan terlibat di banyak organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keprofesian. Selain sebagai Dosen dan Penulis, ia juga aktif terlibat dalam banyak kegiatan *research* tentang dinamika politik dan pembangunan, kebijakan publik, dan pelayanan publik.



Dr. Willy Tri Hardianto, S.Sos., M.M., M.A.P., lahir di Malang Jawa Timur pada tahun 1980. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Magister Manajemen (MM) juga di diperoleh di UB Malang. Magister Administrasi Publik (MAP) diperoleh dari Universitas Tribhuwana Tunggaladewi (UNITRI) Malang. Gelar Doktor diperoleh dari UB Malang. Penulis, hingga

saat ini tercatat sebagai pengajar di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi (UNITRI) Malang pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Sejak 2017 hingga saat ini, Penulis menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unitri. Selain sebagai Dosen, Penulis juga aktif menjadi pembicara di forum-forum ilmiah dan banyak terlibat dalam kegiatan *research* tentang pelayanan publik.

Diperlukan upaya serius untuk mengubah wajah birokrasi kita saat ini. Awal reformasi (1998) hingga saat ini, bukanlah masa yang singkat; namun ibarat raport merah, wajah birokrasi Indonesia masih diwarnai laporan miring berupa sikap arogan birokrat, dan objektifikasi terhadap rakyat yang harusnya menjadi pihak yang justru dilayani dengan baik. Pun demikian dengan tubuh birokrasi; compang-camping karena berbagai macam praktik KKN, suap, dan gratifikasi, serta mentalitas birokrat yang amoral menjadi lampu merah belum tuntasnya pencapaian visi dan misi Reformasi Birokrasi.

Melalui buku ini, Penulis mengajak kita mengecek kembali cita-cita negara dalam mereformasi birokrasi Indonesia yang tertuang dalam berbagai peraturan yang telah ada, mengevaluasi, serta mengupayakan kembali tumbuhnya semangat reformasi demi terwujudnya akuntabilitas, equitas, dan kualitas pelayanan publik. Muaranya tidak lain adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Penyusunan yang didasarkan pada trajektori pembahasan sebagaimana dikaji oleh mahasiswa di perguruan tinggi Negeri/Swasta di Indonesia membuat buku ini tepat dibaca oleh mahasiswa yang mengkaji materi dasar reformasi birokrasi dan governance. Para pegiat yang konsen dalam mengawal kinerja birokrasi khususnya dalam sektor layanan publik pun, perlu kiranya merujuk buku ini demi ketajaman analisis mereka.

Reformasi Birokrasi

— dan —

Good Governance



INTRANS PUBLISHING
REBUT PERUBAHAN DENGAN MEMBACA

Jl. Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang
Telp. (+62)341-573650
Fax. (+62)341-588010
Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pernaskahan)
intrans_malang@yahoo.com (Pemasaran)
www.intranspublishing.com

SOSPOL U-15+
ISBN: 978-602-6293-84-8



9 786026 293848

Harga P. Jawa Rp. 70.000